
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKJIP)
TAHUN 2021

KECAMATAN PAGELARAN



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah Kecamatan Pagelaran diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen laporan Kinerja untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Melalui LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bias dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pagelaran ditahun berikutnya.

C. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Pagelaran memiliki kedudukan yang cukup strategis karena berada di pertengahan kabupaten antara Cianjur Utara dan Cianjur Selatan, juga Kecamatan Pagelaran berbatasan dengan 4 (empat) Kecamatan yakni :

Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Pasirkuda

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kadupandak

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanggeung

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukanagara

Luas wilayah Kecamatan Pagelaran \pm 5.201. ha dengan letak geografis Kecamatan Pagelaran berada di $6,82^{\circ}$ – $7,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan $107,13^{\circ}$ – $108,56^{\circ}$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 1.167 M di atas permukaan laut.

Jangkauan (orbitasi) jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Pagelaran ke Ibukota Kabupaten adalah 60 Km dan ke Ibukota Provinsi adalah 120 km.

Secara administratif Kecamatan Pagelaran terdiri dari 12 Desa yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kelurahan / Desa	Nama Kepala Lurah / Kepala Desa
1	PAGELARAN	RACHMAT RUSYANDI
2	PADAMAJU	ATAM SUPRIATNA
3	BUNIWANGI	MAMAT ROHIMAT
4	BUNIJAYA	SUKANDI WAHYUDI
5	PANGADEGAN	DEDE SUHARDIN
6	SITUHIANG	ARIFIN HIDAYAT
7	PASIRBARU	DENDEN PITRIANADI
8	SINDANGKERTA	Pjs. ASEP SUNARLAN, S.IP
9	KARANGHARJA	MASROPAH
10	SELAGEDANG	ASEP SUSANTO RISWANDI
11	GELARANYAR	JENAL, S.Pd
12	MEKARSARI	Atep BAYU MU'MIN
13	SUKAMAJU	MULYANA
14	KERTARAHARJA	ENDANG ADI HIDAYAT

Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

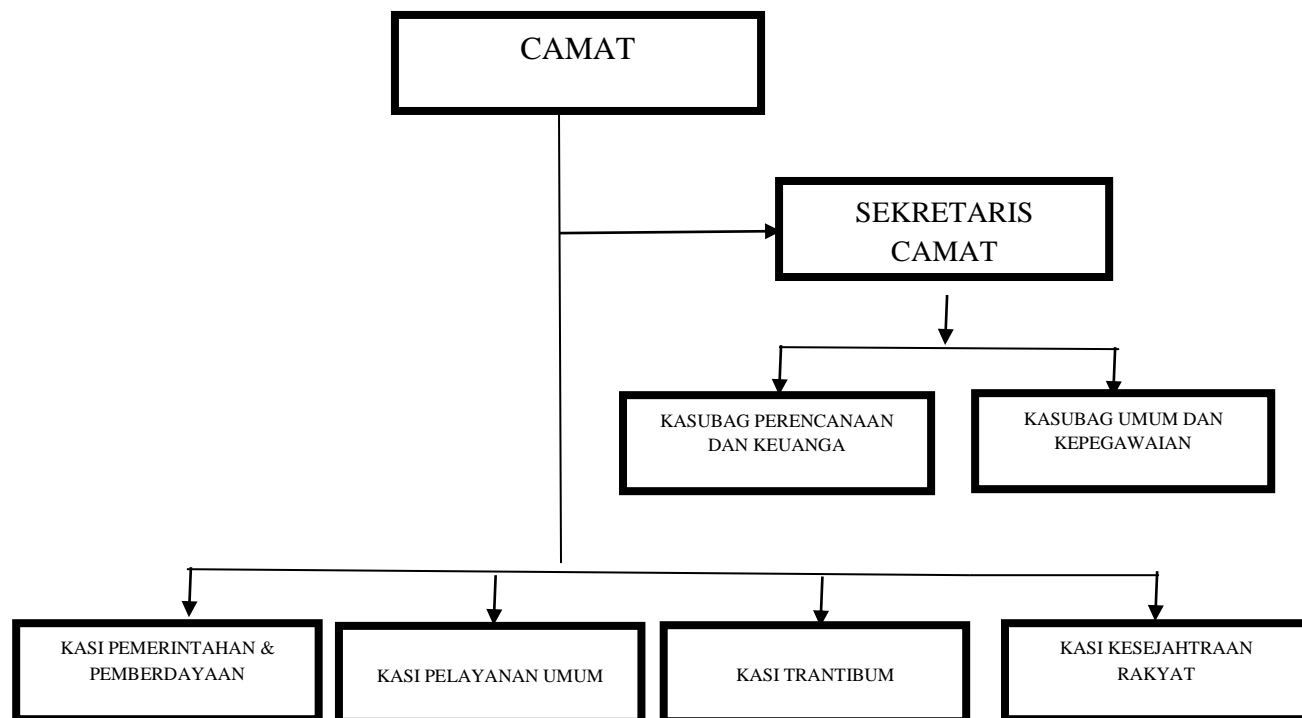
**Jumlah RW/RT Se- Kecamatan Pagelaran
Tahun 2021**

NO.	KELURAHAN	RW	RT
1	PAGELARAN	6	30
2	PADAMAJU	5	23
3	BUNIWANGI	10	28
4	BUNIJAYA	7	31
5	PANGADEGAN	10	30
6	SITUHIANG	6	32
7	PASIRBARU	5	30
8	SINDANGKERTA	8	31
9	KARANGHARJA	6	20
10	SELAGEDANG	8	33
11	GELARANYAR	5	18
12	MEKARSARI	8	24
13	SUKAMAJU	8	16
14	KERTARAHARJA	5	26
	JUMLAH	97	372

Sumber : laporan kasi ppm bln des 2021

D. Struktur Organisasi Kecamatan Pagelaran

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAGELARAN



E. Sumber Daya Perangkat Daerah

E.1. Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil di Kecamatan Pagelaran sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebanyak 20 Orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin berdasarkan kedudukan dalam organisasi Kecamatan Pagelaran sebagaimana ditunjukkan pada table berikut:

Komposisi Pegawai Kecamatan Pagelaran Kab. Cianjur (Bulan Desember 2021)

No	Kedudukan	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat			
	1. Sekretaris	1	-	1
	2. Kasubag Umpeg	1	-	1
	3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
	4. Bendahara Pengeluaran	1	-	1
	5. Pengelola Barang	-	1	1
	5. Non PNS	3	2	5
3	Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Kasi	1	-	1
	2. Pengadministrasi Pemerintahan	1	-	1
	3. Pengelola PPAT	-	-	-
	4. Non PNS	1	-	1

4	Seksi Pelayanan Umum 1. Kasi 2. Pengadministrasi Perizinan 3. Non PNS	- - 2	1 - 1	1 - 3
5	Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum 1. Kasi 2. Pranata Perlindungan Masyarakat 3. Non PNS	1 1 3	- - -	1 1 3
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat 1. Kasi 2. Pengelola Kesejahteraan 3. Non PNS	1 - -	- - -	1 - -

Komposisi pegawai Kecamatan Pagelaran menurut status kepegawaian sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

Komposisi pegawai Kecamatan Pagelaran menurut status kepegawaian

No	Status	Jumlah	Terbagi Pada					Seksi Kesra
			Camat	Sekretariat	Seksi PPM	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Trantibum	
1	PNS	11	1	5	2	1	1	1
2	Non PNS	9	-	5	1	3	-	-
Jumlah		20	1	10	3	4	1	1

Komposisi pegawai Kecamatan Pagelaran menurut latar belakang pendidikan terakhir sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

Komposisi pegawai Kecamatan Pagelaran menurut latar belakang pendidikan terakhir

No	Status	Jumlah	Terbagi Pada					Seksi Kesra
			Camat	Sekretariat	Seksi PPM	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Trantibum	
1	S.3	-	-	-	-	-	-	-
2	S.2	1	1	-	-	-	-	-
3	S.1	11	-	7	1	1	1	1
4	SM/D.3	-	-	-	-	-	-	-
5	SLTA	6	-	3	2	1	-	-
6	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
7	SD	2	-	-	-	2	-	-
Jumlah		20	1	10	3	4	1	1

Komposisi pegawai Kecamatan Pagelaran menurut Eselonering sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

Komposisi pegawai Kecamatan Pagelaran menurut Eselonering

No	Status	Jumlah	Terbagi Pada					Seksi Kesra
			Camat	Sekretariat	Seksi PPM	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Trantibum	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	2	1	1	-	-	-	-
3	Eselon IV	6	-	2	1	1	1	1
4	Non Eselon	3	-	2	1	-	-	-
5	Lainnya	9	-	5	1	3	-	-
Jumlah		20	1	10	3	4	1	1

Komposisi pegawai Kecamatan Pagelaran berdasarkan kepangkatan/golongan sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

Komposisi pegawai Kecamatan Pagelaran berdasarkan kepangkatan/golongan

No	Status	Jumlah	Terbagi Pada					Seksi Kesra
			Camat	Sekretariat	Seksi PPM	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Trantibum	
1	IV	1	1	-	-	-	-	-
2	III	8	-	5	1	1	1	1
3	II	1	-	-	1	-	-	-
4	I	-	-	-	-	-	-	-
5	Lainnya	9	-	5	1	3	-	-
Jumlah		20	1	10	3	4	1	1

E.2. Aset yang dikelola

Kondisi sarana-prasarana yang dimiliki Kecamatan Pagelaran dapat dikatakan relatif belum memadai. Untuk kegiatan administrasi sehari-hari, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana Kecamatan Pagelaran

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	1 unit	1 Baik
2	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Baik
3	P.C Unit	3	Baik
4	Lap Top	4	2 Baik 2 Rusak Berat
5	Monitor	1	Baik
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Baik
7	Peralatan Jaringan lainnya	1	Baik
8	masker lainnya (dst)	1	Baik
9	Mini Bus	2	Baik
10	Sepeda Motor	7	5 Baik 2 Rusak Berat
11	Gerobak Dorong	1	Baik
12	Lemari Kayu	1	Rusak Ringan
13	Locker	1	Baik
14	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik
15	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik
16	Mesin Absensi	2	1 Baik 1 Rusak Berat
17	Display	1	Baik
18	Alat Kantor Lainnya	1	Rusak Berat
19	Meja Kerja Kayu	5	Rusak Berat
20	Kursi Besi/Metal	4	3 Baik 1 Rusak Berat
21	Meja Resepsionis	4	Baik
22	Meja Komputer	1	Rusak Berat
23	Sofa	1	Rusak Berat
24	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
25	Air Cleaner	2	Baik
26	Dispenser	1	Baik
27	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
29	Meja Rapat Pejabat lainnya	8	Baik
30	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik
31	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Baik
32	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Baik
33	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2	Baik
34	Layar Film/Projector	1	Baik
35	Mesin Barcode	1	Baik
36	Handy Talky (HT)	2	Baik
37	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Baik
38	Unit Tranceiver FM	1	Rusak Berat
39	Genset	1	Rusak Berat
40	Alat Kedokteran umum lainnya	1	Baik

F. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pembangunan pelayanan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

F.1. Tantangan

Tantangan yang ada terhadap birokrasi Kecamatan terdapat beberapa hal :

1. Kemajuan teknologi terutama informasi, pada saat ini birokrasi dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat;
2. Era keterbukaan informasi public menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah serta transparan;
3. Implementasi kebijakan public desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan public dan pembangunan kesejahteraan masyarakat;
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis menuntut birokrat lebih adaptif, kompetitif dan memiliki kompetensi serta memahami regulasi yang ada;
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
6. Pandemi covid-19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan Perangkat Daerah sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan pandemic covid-19;

F.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrat pada kecamatan untuk mengembangkan diri dan melayani masyarakat, antara lain :

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik;
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan public yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani;
3. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan asset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan;
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat;
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan kepada birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan pengguna teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat;

G. Isu-isu Strategis

Analisa isi-isu strategis merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pagelaran adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan menjadi tolok ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Kabupaten Cianjur pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang krusial.

Upaya untuk mewujudkan Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor. 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan Pagelaran sejak Tahun 2014 telah melaksanakan PATEN yang disempurnakan dengan Aplikasi Laporan Elektronik Secara Terpadu (LEKAT) pada tanggal 1 April 2019. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari 3 (tiga) pelayanan, yaitu Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelayanan Trantib dan Kesra. Ketiga pelayanan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing seksi yang saling bersinegri didalam pelaksanaan tugasnya,

yaitu Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Trantib dan Seksi Kesra.

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor. 4 Tahun 2010, yaitu persyaratan substantif, administratif dan tekhnis. Secara substantif Kecamatan Pagelaran telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor. 46 Tahun 2016 dibidang perizinan dan non perizinan. Secara administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya persyaratan tekhnis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan tekhnis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan dari pegawai Kecamatan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Kecamatan yang diawali dari musyawarah pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui MUSRENBANG.

3. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender yang dimulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan harus bisa mengakomodir kelompok prioritas dalam pembangunan, yaitu perempuan.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon

informasi publik, demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pemohon dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Publik, ada sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur selama Tahun 2016-2021.

1. VISI DAN MISI

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 -2021, maka Pemerintah Kecamatan Pagelaran mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

“Cianjur Lebih Maju dan Agamis”

Visi

“Cianjur Lebih Maju dan Agamis”

Misi

Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2021-2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter aparat kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan;
3. Mendorong penciptaan wirausaha baru;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan ekonomi wilayah;
7. Mewujudkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam lingkup wilayah Kecamatan;
8. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam upaya menumbuhkan ekonomi daerah;

3. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- b) Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Terselenggara-nya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan
- d) Teridentifikasi-nya potensi dan terfasilitasinya pengembangan wirausaha baru.
- e) Terselenggara-nya perencanaan pemba-ngunan keca-matan yg partisipatif.
- f) Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang anggarannya tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau APBN.
- g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha
- h) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh kecamatan.

- i) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya melalui keterkaitan antar kelompok usaha

4. PROGRAM

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Untuk Tahun 2021 Kecamatan Pagelaran telah menetapkan 5 Program Urusan Wajib dan 1 Program Non Urusan yaitu :

a. Program Urusan Wajib terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Program Non Urusan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kecamatan Pagelaran berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

Tabel. 2.2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN PAGELARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat dan Pelayanan Kepada OPD Terkait yang Optimal	1.1	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait	100%
		1.2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	100%

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.213.581.340,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 83.176.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 21.575.000,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 21.500.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 49.500.000,00	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 69.200.160,00	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 2.458.533.100,00	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pagelaran Tahun 2021

6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada Tahun 2021 Kecamatan Pagelaran melaksanakan 5 (lima) Program wajib dan 1 program Non urusan :

Rencana Belanja Daerah Kecamatan Pagelaran Tahun Anggar 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	%
1	Belanja Operasi	Rp. 2.428.533.100,00	94,02
	Belanja Pegawai	Rp. 2.031.745.600,00	92,85
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 396.787.500,00	99,57
2	Belanja Modal	Rp. 30.000.000,00	99,57
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 30.000.000,00	99,57
Total Anggaran Belanja		Rp. 2.458.533.100	100

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Pagelaran Tahun 2021

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

**Alokasi Anggaran Belanja
Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.213.581.340,00	DAU dan PAD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 83.176.000,00	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 21.575.000,00	DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 21.500.000,-	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 49.500.000,00	DAU
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 69.200.160,00	PAD
	Jumlah Anggaran	Rp. 2.458.533.100,00	

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%
		2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%

Sumber : IKU Kecamatan Pagelaran Tahun 2021

BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi (IKU)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pagelaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Pagelaran dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pagelaran dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian rencana target	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public yang transparan dan akun tabel	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait 2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU Kecamatan Pagelaran sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indicator kinerja tersebut sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD, Kecamatan Pagelaran memiliki 2 kegiatan yaitu :

- a. **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke Forum OPD.
- b. **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**, kegiatan dilaksanakan oleh kecamatan secara berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan

kelancaran program pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota .

- c. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan/monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa di Kecamatan Pagelaran. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setahun dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan Daerah (BPPD).
- d. **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,** merupakan kegiatan koordinasi antar lintas sectoral di Tingkat Kecamatan, sebagai sarana untuk membahas program kegiatan di Tingkat Kecamatan, membahas serta menyelesaikan permasalahan baik yang ada di Desa maupun di Tk. Kecamatan.

2. Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pagelaran mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- a. **Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa** merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam Surat Keputusan Camat tentang Pendamping ADD Kecamatan.

Tim ini terdiri dari :

- Camat sebagai Penanggungjawab
- Sekretaris / Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua
- Kasi PPM sebagai sekretaris
- Karyawan yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 12 Desa di Kecamatan Pagelaran agar pelaksanaannya bisa tepat waktu.

- b. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**, merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.
- c. **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**, Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-tempat strategis di Kecamatan Pagelaran bisa terjaga kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
- d. **Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**, merupakan kegiatan pembinaan dan monitoring kegiatan vaksinasi covid-19 dalam upaya penanganan, pengendalian dan pencegahan penularan wabah Covid-19, serta monitoring penyaluran bantuan social yang disalurkan kepada masyarakat.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja yang mengacu pada perjanjian kinerja Tahun 2021, pada sasaran kinerja Kecamatan Pagelaran yaitu : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan Pagelaran terdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pagelaran Tahun 2021 :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun X			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun x terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100	100	100	100	100	100
		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100

B.1. Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Target Tahun 2021	Ralisasi Tahun 2021	Capaian (%)	Target Akhir PK	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir PK	Ket.
Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait	%	100	100	100	100	100	100	Terca pai

Deskripsi sasaran :

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait kecamatan Pagelaran melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :

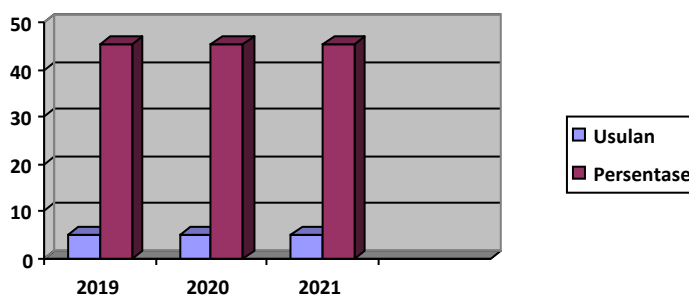
1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada Tahun 2021 Kecamatan Pagelaran menerima 14 usulan hasil Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bappeda menjadi 5 prioritas kecamatan. Dari 14 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang Tk. Kecamatan Pagelaran hanya 5 usulan yang diakomodir oleh OPD terkait atau sebesar 35,71%. Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 9,09%. Peningkatan tersebut didukung dikarenakan adanya percepatan perbaikan infrastruktur menuju Kawasan wisata yang ada di Kecamatan Pagelaran.

Grapik 1

Perkembangan realisasi Persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan



Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pagelaran dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada Tahun 2021 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi persentase tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan Pagelaran dapat melaksanakan kegiatan Monev ke 12 Desa.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan/monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan/monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 dokumen	1 dokumen	100%

Target PBB Kecamatan Pagelaran Tahun 2021 sebesar **Rp. 591.355.639,00**

sampai Desember 2021 PBB yang telah lunas sebesar Rp. **412.054.857,00**

Sehingga persentase pemenuhan taret PBB Kecamatan Pagelaran Tahun 2021 sebesar 69,68%

4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%

merupakan kegiatan koordinasi antar lintas sectoral di Tingkat Kecamatan, sebagai sarana untuk membahas program kegiatan di Tingkat Kecamatan, membahas serta menyelesaikan permasalahan baik yang ada di Desa maupun di Tk. Kecamatan, telah dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, ditambah kegiatan rakoord situasional.

B.2. Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2019	Target Tahun 2020	Ralisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Target Akhir PK	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir PK	Ket.
Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	Terca pai

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan adalah salahsatu representasi pemerintah yang paling dekat dengan

masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan ujung tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Di Tahun 2021 untuk pemenuhan target pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Pagelaran didukung oleh 4 kegiatan berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 14 Desa di Kecamatan Pagelaran agar pelaksanaannya bisa tepat waktu. Pada Tahun 2021 realisasi untuk kegiatan pendampingan ADD mencapai 100%. Realisasi persentase tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan Pagelaran dapat melaksanakan kegiatan Pendampingan ADD ke 14 Desa.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Pembinaan PKK	14 Desa	14 Desa	100

Tim Penggerak PKK Kecamatan Pagelaran telah membudayakan Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan mengacu pada hasil Rekernas VII tahun 2010.

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :

1. Pokja I :

- a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Bidang Gotong Royong.

2. Pokja II :

- a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
- b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

3. Pokja III :

- a. Bidang Pangan;
- b. Bidang Sandang;
- c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.

4. Pokja IV :

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;
- c. Perencanaan Sehat

3. **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum/Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan** dalam rangka menunjang kegiatan K5, kegiatan ini merupakan salahsatu upaya dari Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dengan masyarakat sekitar sebagai petugas kebersihan sebanyak 3 orang dan dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan lainnya.
4. **Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat,** merupakan kegiatan Sosialisasi, pembinaan dan monitoring kegiatan vaksinasi covid-19 dalam upaya penanganan, pengendalian dan pencegahan penularan wabah Covid-19, serta monitoring penyaluran bantuan social yang disalurkan kepada masyarakat. Kegiatan ini telah direalisasikan 99,91%. Capaian Target Vaksinasi di Kecamatan Pagelaran, Alhamdulillah telah telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan mendapat apresiasi yang baik dari Pemda kab. Cianjur.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan Alhamdulillah hampir semua kegiatan telah tercapai anggaran 100% yaitu :

Tabel 3.3
Analisis Efisiensi Anggaran
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan	Capaian Kinerja	% Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	1. Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	99,20	0,80
			2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100	100	0
			3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100	100	0
			4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,	100	100	0
		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	1. Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	100	0
			2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100	0
			3. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100	100	0
			4. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	99,91	0,09

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

D. Realisasi Anggaran

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			TARGET	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mening	Prosentase	100	100	100	Koordinasi/	5.000.000	5.000.000	100

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	katnya kualitas pelayanan public yang transparan dan akuntabel	pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait				Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.190.000	26.190.000	100
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13.265.000	13.265.000	100
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,	49.500.000	49.500.000	100
			100	100	100	Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	43.010.160	43.009.810	100
		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.575.000	21.575.000	100
						Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	64.911.600	64.911.600	100
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000	10.000.000	100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

**Realisasi Anggaran Belanja Non Urusan
Tahun 2021**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.161.614.400,00	1.836.773.620,00	84,97
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10.000.000,00	9.994.000,00	99,94
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.039.647.600,00	1.894.381.486,00	92,85
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	11.500.000,00	11.500.000,00	100
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	23.954.220,00	23.943.720,00	99,96
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	21.200.000,00	21.090.000,00	99,48
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	101.279.520,00	101.278.140,00	100
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

B A B. IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan public, setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pagelaran Tahun 2021 ini merupakan salahsatu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja Tahun 2021 dan dilengkapai dengan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat dilihat bahwa Kecamatan Pagelaran berupaya dengan gigih agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Pagelaran Tahun 2021 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Pagelaran untuk terus mengoptimalisasi target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN PAGELARAN

Alamat: Jln. Raya Pagelaran RTL 4D Kode Pos 43266 kec.pagelaran@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PAGELARAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

CAMAT PAGELARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2021, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2021,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pagelaran Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 No. 43);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranagkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 22);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2021,
 - b. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan

